

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: MNC.
- Fikry, N, M. 2017. *Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hwian, C. 2015. *Cyberpornography Kejahatan Pornografi Masa Kini*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Idris, M, A dan Tjiptomartono, L, A. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*. Jakarta: Karya Unipres.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Juwono, H. 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Kansil, C.S.T. *et.al.* 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Marpaung, L. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (cybercrime)*. Jakarta: Prenada Media.

- Mertokusumo, S. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Samosir, D. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shant, D. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhariyanto, B. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Suseno, S. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, G, I. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi / Aksi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yuniar, T. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.
- Zainal, A. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP. 2016. *Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-anak*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1(2): 107-121
- Hardianti, N, Ririn. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*. *JOM Fakultas Hukum*. 3(2): 1-16.

Karunia, A, Ana. 2022. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 10(1): 115-128.

Nofrianto, Koko. 2016. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 3(2): 1-11.

Safiranita, Tasya. 2017. *Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 8(2): 11-26.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / *Wetboek Van Strafrecht*).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Lain-lain

Rufiqo, Mufita. 2014. *Cyberporn Dalam Bingkai Media Massa Studi Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Tentang Pemberitaan Bisnis Prostitusi Online Di Surat Kabar Online Kompas Dan Tempo Edisi 8-13 Februari 2013*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/19_unit_ppa

Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 10.53 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yayuk Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Pada Tanggal 20 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Veldy Verdyanto, S.H, Selaku Ketua Tim Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Pada Tanggal 15 Februari 2022.